

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas public dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013.

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan SAP dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan dapat dilihat dari Opini Auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013 yang tertuang dalam Laporan BPK Nomor 14.A/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 21 Mei 2014, BPK menyatakan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2013 atas permasalahan yang berkaitan dengan :

- 1) Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas yang tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti yang valid sebesar Rp 2,21 Miliar.
- 2) Saldo Aset Tetap yang dilakukan penilaian kembali sebesar Rp 163,13 Miliar sehingga tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 3) Saldo Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 77,52 Miliar yang tidak sesuai SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.

Dalam Laporan BPK Nomor 07.B/LHP/XVIII.PDG/05/2015 tanggal 13 Mei 2015, BPK menyatakan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2014 atas permasalahan yang berkaitan dengan :

- 1) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 101,81 Miliar. Diantara realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut, sebesar Rp 5,44 Miliar direalisasikan berupa pemberian uang tunai kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang seharusnya direalisasikan sebagai belanja hibah, sehingga tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 2) Saldo aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 903,66 Miliar dan sebesar Rp 945,79 Miliar. Dari nilai aset tetap tersebut, diketahui bahwa:

- Tanah untuk 180 ruas jalan yang belum dicatat.
- Peralatan dan Mesin sebesar Rp 9,06 Miliar tidak dapat ditelusuri Keberadaannya.
- Gedung dan Bangunan sebesar Rp13,36 Miliar disajikan tidak sesuai dengan kondisi fisik.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 54,15 Miliar tidak dicatat secara rinci per jenis aset dan per satuan unit aset, sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
- Aset Tetap Lainnya berupa buku sebesar Rp 2,96 Miliar tidak dicatat secara rinci, sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp9,03 Miliar tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebesar Rp 2,51Miliar yang telah diserahkan kepada pihak ketiga dan belum ditetapkan statusnya.

Berdasarkan pemberian Opini BPK diatas dapat dijelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan belum sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga mengakibatkan kerugian pemerintah daerah, kekurangan penerimaan pemerintah daerah, kelemahan administrasi, ketidak hematatan, ketidak efisienan dan ketidak efektifan. Hal ini disebabkan oleh kompetensi SDM Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Aset, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Pariaman masih belum memadai.

Pada penelitian yang meneliti tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan seperti Winidyaningrum.C dan Rahmawati (2010), Yudianta. AI dan Erawati (2011), Wansyah.H, Darwanis dan Bakar.U (2012), Delanno.FG dan Deviani (2013), Roshanti.A dan Sinarwati.K (2014) dan Ridha.M (2015). Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa faktor sumber daya manusia baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sedangkan penelitian Zuliarti (2012), Desmiyawati (2014), Rofika dan Ardianto (2014) menghasilkan bukti empiris yang berbeda yaitu kualitas sumber daya manusia secara parsial maupun simultan tidak memberikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya perbedaan hasil penelitian (gap riset) tersebut membuat peneliti ingin meneliti kembali hal tersebut di daerah yang berbeda, waktu yang berbeda dan satuan kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui apakah faktor kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern. Salah satu fenomena dalam penelitian ini adalah adanya temuan kelemahan pada sistem pengendalian intern sehingga berdampak pada pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian. Sistem pengendalian intern merupakan hal yang penting dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan kualitas laporannya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika sistem pengendalian intern dalam pelaksanaannya lemah maka pengelolaan keuangan daerah menjadi tidak tertib, tidak transparan dan tidak akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Arfianti.D dan Kawedar.W (2011), Tanjung.R dan Amries, K (2012), Roshanti.A Sujana.E dan Sinarwati.K (2014) dan Darmayani.A.M, Herawati.T.N dan Atmaja.T.A (2014), menemukan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian berbeda dikemukakan oleh Azlina.N dan Desmiyawati (2012) dan Suwardiman (2016) menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai pemanfaatan komputer dan berbagai teknologi lain dalam mendukung tugas pimpinan/organisasi, dengan komponen-komponen: ketersediaan mesin (*hardware/software*), jaringan (*network*), kesiapan aplikasi (*procedures/application*), personil (*brainware/peopleware*), *database*, dan pemakai serta lingkungannya (*user and environment, social context, the culture of the people and groups involved*).

Winidyaningrum.C & Rahmawati (2010) dan Ridha.M (2015) dalam penelitiannya memberikan bukti adanya pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi

laporan keuangan pemerintah. Namun penelitian Arfianti.D dan Kawedar.W (2011), Darmayani.A.M, Herawati.T.N dan Atmaja.T.A (2014) dan Nasir.A dan Oktari.R (2010) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Adanya perbedaan hasil penelitian (gap riset) tersebut membuat peneliti ingin meneliti kembali hal tersebut di daerah yang berbeda, waktu yang berbeda dan satuan kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui apakah faktor pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *stewardship theory* sebagai teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel-variabel kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel yang mempengaruhi kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

*Stewardship theory* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Asumsi penting dari *stewardship theory* adalah manajemen meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik (Raharjo, 2007).

Pada penelitian ini mengelaborasi kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dari pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, Fokus masalah dan Locus Penelitian. *Pertama*, faktor-faktor yang diharapkan dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah faktor kompetensi

sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi. *Kedua*, pemilihan variabel sistem pengendalian intern dan teknologi informasi dilatar belakangi karena adanya unsur temuan terkait fenomena yang diungkap yaitu terdapat kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Pariaman dengan pemberian Opini oleh BPK RI dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian.

*Ketiga*, *focus penelitian* pada penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan pada organisasi sektor *private* dan organisasi sektor publik pada Pemerintah Kementerian/Lembaga yang memiliki perbedaan struktur organisasi yang berbeda sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini penulis beri judul : **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual” (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Pariaman).**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut masalah yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Pariaman?
2. Apakah pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Pariaman?

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Pariaman?
4. Apakah kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Pariaman?

### 1.3 Tujuan Penelitian

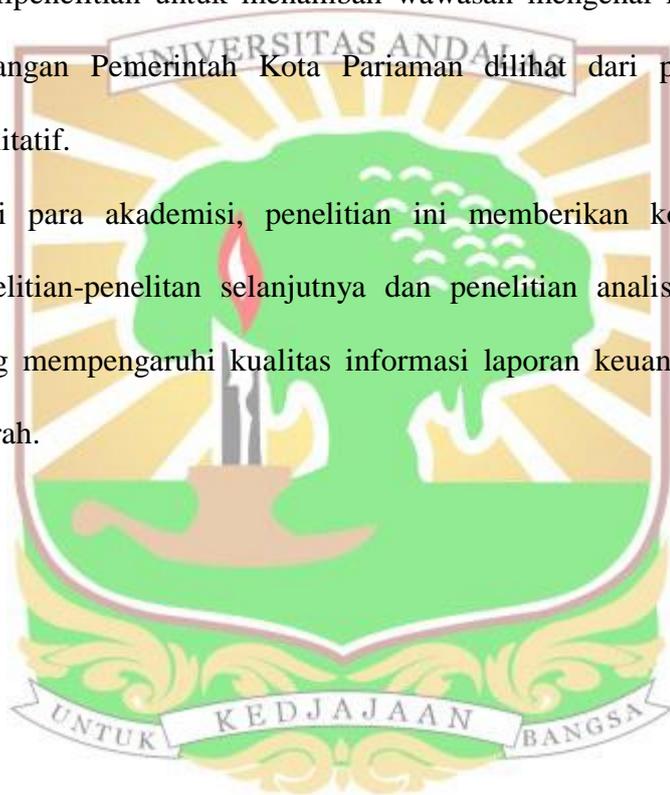
Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Pariaman.
2. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Pengendalian Intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman.
3. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman.
4. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara bersama-sama terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil penelitian untuk menambah wawasan mengenai kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman dilihat dari pengaruh faktor kualitatif.
3. Bagi para akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kajian landasan teori yang berisikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan yang berupa deskriptif penelitian, uji hipotesis, pembahasan penelitian dan implikasi penelitian.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

